

ABSTRAK

Judul skripsi adalah: Deskripsi Tentang Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: 1). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya? 2). Bagaimana Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya?. 3). Apa Akibat Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya?. Tujuan 1). Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya. 2). Untuk Mengetahui Cara Yang Digunakan Oleh Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya. 3). Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti Dari Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis dan jenis penelitian adalah yuridis normatif. Variabel bebas ialah Faktor Penyebab, Cara Pelaku, Dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya. Variabel terikat adalah putusan pengadilan tentang tindak Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya, yaitu; A). Mendapatkan Keuntungan. B). Penyalagunaan Status Sebagai Pengecer Resmi. C). Cara pelaku melakukan tindak pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya, yaitu; A). Menjual Diatas Harga Eceran Tertinggi. B). Melakukan Penjualan Kepada Orang Yang Tidak Terdaftar Dalam RDKK. D). Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya. A). Akibat hukum terhadap pelaku, dipidana penjara dan dipidana denda. B). Akibat hukum terhadap barang bukti, dirampas untuk Negara dan dirampas untuk dimusnahkan. Saran: 1). Untuk mencegah terulangnya tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk, khususnya pada pengecer resmi. Penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan ketentuan, baik dari segi harga, jumlah, maupun penerima yang terdaftar dalam RDKK. 2). aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran agar menimbulkan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi pupuk.

Kata kunci: Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya

ABSTRACT

This study is titled *"Description of the Criminal Act of Selling Subsidized Fertilizer Outside Its Intended Allocation."* The main focus of this research is to analyze and describe the causal factors, the methods used by perpetrators, and the legal consequences of the criminal act of selling subsidized fertilizer outside its designated distribution system. The problems examined in this study include: (1) The factors that cause the criminal act of selling subsidized fertilizer outside its intended allocation; (2) The methods used by the perpetrators in committing this crime; and (3) The legal consequences for the perpetrators and the evidence involved. The aim is to provide a comprehensive understanding of these aspects. This research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical nature, examining the applicable legal norms and supported by case studies. The independent variables in this study are the causal factors, the perpetrators' methods, and the legal consequences, while the dependent variable is the court ruling regarding the act of selling subsidized fertilizer outside its intended allocation. The results indicate that the main causes of this crime are the pursuit of personal profit and the abuse of authority by registered distributors. The modus operandi includes selling fertilizer above the Maximum Retail Price (HET) and selling to individuals not listed in the Definitive Plan of Group Needs (RDKK). Legal consequences for the perpetrators include imprisonment and fines, while the confiscated evidence is either seized for the state or destroyed. The recommendations proposed include increasing government oversight over the distribution of subsidized fertilizers and ensuring that distribution aligns with established regulations. Furthermore, law enforcement officers must take firm action against violators to create a deterrent effect and maintain public trust in the fertilizer subsidy policy.

Keywords: Criminal Act, Selling Subsidized Fertilizer, Outside Its